



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG DJUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR I, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 (20 saluran), 3852143; FAKSIMILE (021) 3500842; SITUS www.depkeu.go.id

KETERANGAN PERS

Presiden Sampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011

Jakarta – Pada hari ini, Senin 19 Maret 2012 bertempat di Gedung Kementerian Keuangan Jalan Juanda Jakarta, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Pimpinan Lembaga Tinggi Negara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011. Presiden dan para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara memanfaatkan fasilitas “Drop Box” sebagai sarana untuk menyampaikan SPT Tahunan-nya.

Dalam laporannya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah berbuah manis. Reformasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil memperoleh apresiasi positif dari masyarakat dan bahkan telah memberikan inspirasi bagi instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun internasional. Hasil survei integritas sektor publik tahun 2011 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DJP memperoleh nilai 7,65 (dari skala 10), jauh di atas nilai standar minimal integritas yang ditetapkan KPK, sebesar 6,0. Survey oleh IPB tahun yang sama mengenai Indeks Kepuasan Layanan Wajib Pajak menunjukkan DJP memperoleh skor 3,79 (dari skala 4). Hasil yang baik juga ditunjukkan atas survei terkait Penilaian Inisiatif Anti Korupsi KPK (tahun 2010) dengan hasil 9,73 (dari skala 10) untuk Kode Etik dan 9,82 (dari skala 10) untuk Promosi Anti Korupsi.

Ditengah berbagai kasus yang melanda DJP, komitmen yang tinggi dalam mengemban misi mengumpulkan penerimaan pajak masih tetap terjaga baik. Meskipun ditengah berbagai kekhawatiran penurunan perekonomian negara sebagai akibat krisis dunia, tahun 2011 DJP dapat memenuhi target penerimaan pajak sebesar Rp 872,6 Triliun (99,3 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2011). Tahun 2012 ini, penerimaan perpajakan yang harus dikumpulkan oleh DJP ditingkatkan menjadi Rp 1.032 Triliun atau menyumbang sekitar 78 persen dari total penerimaan negara. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 159,4 Triliun atau sekitar 18 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2011.

Untuk mengamankan penerimaan perpajakan Tahun 2012, DJP telah dan sedang menjalankan beberapa program strategis, diantaranya : Sensus Pajak Nasional (SPN), penggalan potensi pajak sektor-sektor tertentu, pembenahan administrasi Pengusaha Kena Pajak dan edukasi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Program-program ini bertujuan memperluas basis pemajakan sekaligus menggali potensi perpajakan.

Kehadiran Presiden dan Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi ini merupakan wujud ketaatan penyelenggara negara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang diharapkan menjadi panutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu disadari juga, bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan bukanlah semata-mata merupakan tanggung jawab dari Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak, namun merupakan tanggungjawab seluruh elemen bangsa.

Oleh karena itu, peran serta semua elemen bangsa - Presiden, pejabat tinggi Negara, aparat pemerintah, Wajib Pajak dan masyarakat – mutak diperlukan. Dengan menyatukan hati segenap elemen bangsa tersebut maka usaha untuk mengamankan penerimaan pajak menjadi lebih mudah. Selanjutnya, tujuan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan terwujud secara nyata.

Informasi lebih lanjut hubungi :

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan
Telp. (021) 5275139, 5250208 (ext.3595)
Fax. (021) 5736093, 5736088